

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

Oleh

**ERY SILVANA SIREGAR
147024023/SP**



**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

**IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2010
TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI
TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Magister Studi Pembangunan (MSP)
Program Studi Magister Studi Pembangunan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara**

Oleh

**ERY SILVANA SIREGAR
147024023/SP**

**PROGRAM STUDI MAGISTER STUDI PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

Judul Tesis : **IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 4
TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN
PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU
KECAMATAN (PATEN) DI KOTA
PADANGSIDIMPUAN**

Nama Mahasiswa : **Ery Silvana Siregar**
Nomor Pokok : **147024023**
Program Studi : **Magister Studi Pembangunan**

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

(Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA)
Ketua

(Heri Kusmanto, MA, Ph.D)
Anggota

Ketua Program Studi

Dekan

(Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA)

(Dr. Muryanto Amin , M.Si)

Tanggal lulus : 25 Januari 2017

Telah diuji pada

Tanggal : 25 Januari 2017

PANITIA PENGUJI :

Ketua : Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA
Anggota : 1. Heri Kusmanto, MA, Ph.D
2. Drs. Kariono, M.Si
3. Warjio, Ph.D
4. Hatta Ridho, S.Sos, MSP

PERNYATAAN

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN (PATEN) DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

TESIS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Tesis ini disusun sebagai syarat untuk memperoleh gelas Magister Studi Pembangunan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara adalah benar hasil karya penulis sendiri. Adapun pengutipan-pengutipan yang penulis lakukan pada bagian-bagian tertentu dari hasil karya orang lain dalam penulisan Tesis ini, telah penulis cantumkan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya penulis sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, penulis bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang penulis sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Medan, Januari 2017
Penulis,

Ery Silvana Siregar

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 4 TAHUN 2010 TENTANG PEDOMAN PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU KECAMATAN DI KOTA PADANGSIDIMPUAN

ABSTRAK

Salah satu kebijakan Pemerintah di bidang administrasi adalah Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN). Penelitian ini membahas mengenai desentralisasi penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui pendelegasian kewenangan dari Walikota kepada Camat, yang didasari oleh Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan. Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai tahapan dalam pelaksanaan Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN, dan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN di Kota Padangsidimpuan. Dengan menggunakan metode kualitatif, penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penting yaitu koordinasi antar instansi terkait belum maksimal, kualitas dan kuantitas aparatur kecamatan belum memadai. Dari sudut pandang isi kebijakan dan konteks kebijakan, faktor yang paling berpengaruh dalam implementasi Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman PATEN adalah pihak yang kepentingannya dipengaruhi, kedudukan pembuat kebijakan, sumber daya yang tersedia, serta kepatuhan dan daya tanggap. Berdasarkan hasil analisis penelitian, maka kecamatan memegang peranan penting sebagai pusat pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat, terutama daerah yang luas dan sulit dijangkau. Oleh karena itu, selain adanya kewenangan yang luas sesuai dengan porsinya, maka kecamatan juga perlu didukung oleh dana, sarana dan prasarana serta aparatur yang memadai baik kuantitas maupun kualitasnya.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Pendelegasian Kewenangan, PATEN

**POLICY IMPLEMENTATION OF PERMENDAGRI NO. 4 OF 2010 ON
GUIDELINES FOR INTEGRATED ADMINISTRATIVE SERVICES BY SUB
DISTRICT IN PADANGSIDIMPUAN**

ABSTRACT

One of the government's policy in the field of administration is a Permendagri No. 4 of 2010 concerning integrated sub-district administrative services guidelines. This research discusses about the decentralization of public service delivery by local government through the delegation of authority from the regent to the head of sub district, which is based on Permendagri No. 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (The Guidelines for Integrated Administrative Services by Sub District). The purpose of this research was to describe the implementation stages of PATEN and determine the factors that influence the implementation of Permendagri No. 4 of 2010 on guidelines for integrated administrative services by sub district in Padangsidempuan. By using the qualitative methods, this research resulted several important findings such as the coordination between relevant agencies have not maximized, the quality and quantity of sub district officials have not adequately, and also the availability of facilities and infrastructure owned in Implementation Policies Permendagri No. 4 of 2010. Based on the content and context of policy, the most influential factors in the implementation of PATEN in Padangsidempuan consist of the parties whose interests are affected, the position of the policy makers, the availability of resources, and also the compliance and responsiveness. Based on the result of research analysis, sub district plays an important role as a service center that closest to the community, especially in the large areas and hard to reach. Therefore, beside the broad authority according to its portion, sub district also needs to be supported by the funding, facilities and infrastructure, and the adequate of both quality and quantity of sub district officials.

Key words : Policy Implementation, Delegation of authority, PATEN

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan semata hanya kepada ALLAH SWT, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai tugas akhir yang menjadi suatu syarat untuk menyelesaikan studi pada Program Magister Studi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara, Medan.

Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Runtung Sitepu, SH, MH, selaku Rektor Universitas Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. Muryanto Amin, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara.
3. Bapak Prof. Dr. M. Arif Nasution, MA selaku Ketua Program Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara dan penguji pada Ujian Tesis penulis.
4. Bapak Prof. Dr. R. Hamdani Harahap, M.Si selaku sekretaris Program Magister Studi Pembangunan Universitas Sumatera Utara.
5. Bapak Heri Kusmanto, MA, Ph.D sebagai Ketua Komisi Pembimbing dan Drs. Kariono, M.Si sebagai Anggota Komisi Pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan tesis ini.
6. Bapak Warjio, MA, Ph.D dan Bapak Hatta Ridho, S.Sos, MSP selaku penguji yang telah banyak memberikan kritik dan saran.

7. Seluruh Dosen Magister Studi pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara yang telah membekali penulis dengan ilmu pengetahuan selama perkuliahan.
8. Pegawai Magister Studi Pembangunan yang telah banyak membantu menyelesaikan urusan administrasi.
9. Seluruh mahasiswa program Magister Studi Pembangunan FISIP USU Angkatan XXX atas kebersamaannya dalam proses menggali ilmu pengetahuan.
10. Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang telah memberikan izin belajar kepada penulis pada program Magister Studi Pembangunan FISIP Universitas Sumatera Utara.

Secara khusus penulis juga mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ibunda Hj. Netty Makhrani Ritonga dan Ayahanda Alm. H. Abdul Kadir Siregar serta mertua H. Anwar Effendi dan Hj. Latifah Hannum yang telah memberikan doa dan dukungan kepada penulis. Teristimewa kepada suami tercinta Dody Kurniawan, S.AP, MM beserta anak-anak Raihana Nafisyah Kurniawan dan Andhika Syauqi Kurniawan yang merupakan motivator bagi penulis dalam menyelesaikan Tesis ini, dan tak lupa juga kepada abanganda Dodi Fadillah Srg, Kakanda Ade Isnaeni Harahap, Adik-adikku Gunanda Wahyudi, Sheila Roisyah Hutasuhut, Adek Koto beserta keluarga besar suami yang mendukung penuh penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan tepat waktu

Akhir kata penulis berharap agar Tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan.

Medan, 25 Januari 2017
Penulis

ERY SILVANA SIREGAR

RIWAYAT HIDUP

Nama : Ery Silvana Siregar

Tempat/ Tanggal Lahir : Padangsidempuan, 15 Maret 1983

Alamat : Jl. Raja Inal Siregar, Gg. Istana Batunadua
Kota Padangsidempuan

Agama : Islam

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : PNS Pemerintah Kota Padangsidempuan

Pendidikan :

1. SD Negeri No.7 Padangsidempuan : 1989-1995
2. SLTPN I Padangsidempuan : 1995-1998
3. SMUN 3 Plus Sipirok : 1998-2001
4. Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri : 2001-2005
6. Magister Studi Pembangunan FISIP USU : 2014-2016

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
RIWAYAT HIDUP	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vx
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	11
1.3. Tujuan Penelitian	12
1.4. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
2.1. Penelitian Terdahulu	13
2.1.1. Kualitas Pelayanan Publik Keamatan Setelah Perubahan Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Perangkat Daerah	13
2.1.2. Implementasi Program Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sebagai Upaya Profesionalisme Pelayanan Publik.....	15
2.2. Kebijakan Publik	17
2.2.1. Kebijakan Publik Sebagai Suatu Proses	19
2.2.2. Implementasi Kebijakan	22
2.2.3. Model-Model Implementasi Kebijakan	24
2.2.4. Faktor-Faktor yang Berpengaruh Terhadap Implementasi Kebijakan	28
2.3. Pelayanan Publik.....	30
2.3.1. Kualitas Pelayanan Publik	33

2.4.	Desentralisasi Pelayanan Publik	38
2.4.1.	Pendelegasian Kewenangan.....	39
2.4.2.	Pendelegasian Kewenangan Kepada Kecamatan	42
2.4.3	Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	44
BAB III	METODOLOGI PENELITIAN.....	50
3.1.	Jenis Penelitian	50
3.2.	Defenisi Konsep dan Operasional	50
3.3.	Teknik Pemilihan Informan.....	52
3.4.	Sumber Data Penelitian	53
3.5.	Teknik Pengumpulan Data	53
3.6.	Teknik Analisa Data	54
3.7.	Lokasi Penelitian	55
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	56
4.1.	Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	56
4.1.1.	Gambaran Kota Padangsidimpuan	56
4.1.2.	Kondisi Pemerintahan.....	58
4.1.3.	Kondisi Demografis.....	59
4.1.4.	Kondisi Sosial Ekonomi	61
4.1.5.	Kondisi Pendidikan.....	61
4.1.6.	Kondisi Prasarana Transportasi	62
4.1.7.	Keuangan Daerah.....	64
4.2.	Gambaran Umum Kecamatan Padangsidimpuan Utara	65
4.2.1.	Kondisi Umum.....	65
4.2.2.	Perangkat Kecamatan	66
4.3.	Gambaran Umum Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Padangsidimpuan Utara	68
4.4.	Implementasi Permendagri No. 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) di Kota Padangsidimpuan.....	75

4.4.1.	Kepentingan-kepentingan yang mempengaruhi	76
4.4.2.	Jenis Manfaat yang dihasilkan dari Implementasi Kebijakan	78
4.4.3.	Perubahan yang diharapkan	80
4.4.4.	Kedudukan Pembuat Kebijakan	82
4.4.5.	Para Pelaksana Program	85
4.4.6.	Sumber Daya yang Tersedia	89
4.4.7.	Kekuasaan, Kepentingan, Strategi Pelaksana yang Terlibat	96
4.4.8.	Karakteristik Lembaga Penguasa	99
4.4.9.	Kepatuhan Daya Tanggap Pelaksana	101
4.5.	Pembahasan Hasil Penelitian	105
4.5.1.	Isi Kebijakan (<i>Content Of Police</i>)	106
4.5.2.	Lingkungan Kebijakan (<i>Context Of Policy</i>)	117
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN.....	126
5.1.	Kesimpulan	126
5.2	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA		131

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
2.1.	Pergeseran Paradigma Model pelayanan Publik	34
4.1.	Jarak dari Ibukota Padangsidimpuan, Jumlah Desa/Kelurahan di Kota Padangsidimpuan.....	59
4.2.	Rincian Luas Wilayah, Jumlah Penduduk dan Tingkat Kepadatan Penduduk Kota Padangsidipuan Tahun 2015	60
4.3.	Penduduk Berumur 15 Tahun keatas Menurut Kegiatan Utama dan Jenis Kelamin di Kota Padangsidimpuan Tahun 2015.....	60
4.4.	Rincian Komposisi Penduduk Kota Padangsidimpuan Menurut Jenis Mata Pencaharian Tahun 2015	61
4.5.	Tingkat Pendidikan Penduduk Kota Padangsidimpuan Tahun 2015.....	62
4.6.	Prasarana Pendidikan Formal Penduduk Kota Padangsidimpuan Tahun 2015	62
4.7.	Statistik Transportasi Kota Padangsidimpuan Tahun 2013-2015.....	63
4.8.	Realisasi Pendapatan Daerah Kota Padangsidimpuan APBD 2015.....	64
4.9.	Realisasi Belanja Daerah Kota Padangsidimpuan APBD 2015.....	64
4.10.	Rincian Wilayah Kecamatan Padangsidimpuan Utara.....	66
4.11.	Susunan Tim Pelayanan Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kota Padangsidimpuan	87
4.12.	Jumlah Aparatur Kecamatan se-Kota Padangsidimpuan	90
4.13.	Rincian Insentif yang Didasarkan pada Jumlah Penduduk Kecamatan se-Kota Padangsidimpuan.....	102

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
2.1.	Tiga Elemen Sistem Kebijakan	19
2.2.	Proses Kebijakan yang Ideal	22
2.3.	Langkah-langkah mewujudkan PATEN.....	48
3.1.	Teknik Analisis Data	55
4.1.	Peta Wilayah Kota Padangsidimpuan	57
4.2.	Struktur Organisasi Kecamatan Padangsidimpuan Utara..	67
4.3.	Alur Pelayanan Perizinan	73
4.4.	Alur Pelayanan Non Perizinan	74
4.5.	Penyelenggaraan PATEN di Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan.....	79

DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
I.	Pedoman Wawancara	136
II	Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	140
III	Peraturan Walikota Padangsidempuan No. 3 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Sebagian Kewenangan Walikota Kepada Camat untuk Melaksanakan Urusan Pemerintahan Umum dan Pemerintahan Daerah..	143
IV	Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Administrasi Terpadu dilingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan	144
V	Keputusan Walikota Padangsidempuan Nomor 307/KPTS/2014 tentang Tim Teknis Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Kota Padangsidempuan	
VI	Dokumentasi Penelitian.....	158